



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505 Website:
<https://diskominfo.jabarprov.go.id> email:diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

Bandung, 14 Januari 2025

Nomor : 354/KOM.05.04.08/IKP
Sifat : Biasa
Lampiran : 2(dua) berkas
Hal : Permohonan Data PPID

Kepada:
Yth.(DaftarTerlampir)
di
T E M P A T

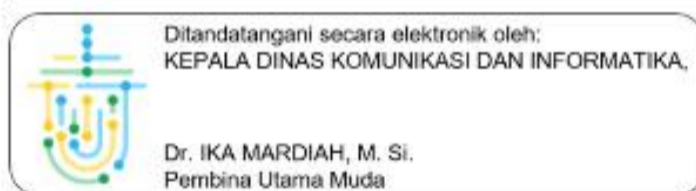
Disampaikan dengan hormat, berdasarkan :

1. Hasil Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat yang telah dilaksanakan pada 23 Desember 2024;
2. Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kami mohon seluruh Perangkat Daerah dapat melengkapi data melalui link: <https://bit.ly/DataRakorPPID2025>. Data yang dikumpulkan berbentuk pdf yang sudah di tandatangi oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai format masing-masing laporan (terlampir). Batas waktu pengisian sampai dengan tanggal **27 Januari 2025**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdri. Yulia (081179929070).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.



F61893039B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRANI: SURAT KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 354/KOM.05.04.08/IKP
TANGGAL : 14 Januari 2025
TENTANG : Permohonan Data PPID

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Inspektur Provinsi Jawa Barat
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
19. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
20. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat
21. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
22. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat
25. Kepala Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Jawa Barat
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
27. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
28. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
29. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
30. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
31. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat
32. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
33. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
34. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
35. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Barat
36. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
37. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
38. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
39. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
40. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
41. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
42. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
43. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
44. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
45. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
46. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat
47. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRANII: SURAT KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR : 354/KOM.05.04.08/IKP
 TANGGAL : 14 Januari 2025
 TENTANG : Permohonan Data PPID

1. Data Untuk Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

(dikumpulkan paling lambat tanggal 27 Januari 2025)

No	EVIDENCE	PERANGKAT DAERAH
1.	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Seluruh Perangkat Daerah
2.	Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2025 (bagi Perangkat Daerah yang akan melakukan <i>update</i> untuk DIK Tahun 2025)	
3.	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (Permasing-masing Perangkat Daerah) Tahun 2025 contoh dapat dilihat di https://ppid.jabarprov.go.id/page/5375-Laporan-Layanan-Infomasi-dan-Dokumentasi	
4.	Laporan Permohonan Informasi Tahun 2024 yang dilengkapi : a. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik b. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak c. Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik (apabila ada).	
5.	Laporan Keberatan Informasi Tahun 2024	
6.	Laporan Sengketa Informasi Tahun 2024	
7.	Program/ Kegiatan Tahun 2025 yang memuat nama program/ kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	
8.	SK Tim PPID Tahun 2025 (untuk dapat di cek kembali pada link https://bit.ly/KajiSKPPIDPelaksanaJabar2024 , (untuk Perangkat Daerah yang ingin melakukan <i>update</i> pada link dimaksud)	

2. Data Untuk Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

(dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Februari 2025)

NO	EVIDENCE	PERANGKAT DAERAH
1.	<ul style="list-style-type: none"> Renstra RKPD 2025 Laporan Capaian RKPD 2025 	Bappeda
2.	LKIP/Lakip Provinsi Jawa Barat 2024	
3.	Dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2022-2025;	Biro Adpim
4.	<p>Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan;</p> <p>Informasi tentang tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2023-2024 yang sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <p>a. Menyediakan dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk</p> <p>b. Menyediakan dokumen risalah rapat dan proses</p>	Biro Hukum



Dokumen digital yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sisaeban.jabarprov.go.id/F61893039B>

	<p>pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk</p> <p>c. Menyediakan dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;</p> <p>d. Menyediakan dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;</p> <p>e. Menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.</p>	
5.	Informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Inspektorat dan BKD
6.	Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2024-2025;	Inspektorat
7.	Dokumen Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024.	
8.	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 secara realtime	BPKAD
9.	Dokumen keuangan tahun 2025 dalam bentuk DIPA dan RKA-KLTahun 2025	
10.	Informasi berkaitan penggunaan atau realisasi anggaran Tahun 2024 (link medsos dengan materi terkait disertai capture/ss)	
11.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Provinsi Jawa Barat (yang telah diaudit) : • LRA 2024 • Neraca Keuangan 2024 • CALK 2024 • Laporan Daftar Aset dan Investasi Tahun 2024 dan 2025 • Perda APBD TA 2025 • LKPD 2024 • Opini BPK RI atas LKPD 2024 • LPPD 2024 • KUA 2025 • PPAS 2025 • RKA PPKD 2025 • Data perbendaharaan atau inventaris 2024- 2025 	
12.	Ringkasan RKA SKPD 2025	Seluruh Perangkat Daerah
13.	Ringkasan DPA SKPD 2025	
14.	<p>Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2024-2025 dan tertuang dalam DIP Tahun 2025.</p> <p>LHKPN Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024</p> <p>Dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai</p> <p>Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2024-2025</p>	
15.	<p>Dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2022–2025; • Surat Perjanjian Kemitraan 2022–2025 	Biro Pemotda
16.	Informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan konstruksi dan atau non-konstruksi sebagaimana tercantum dalam SIRUP (Link SIRUP)	Biro PBJ
17.	Paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2024 berkaitan program atau kegiatan konstruksi dan atau non-konstruksi dalam LPSE yang telah selesai tender (sejumlah 10 Paket beserta link LPSE)	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>




18.	Paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 berkaitan program atau kegiatan konstruksi dan atau non-konstruksi dalam LPSE yang gagal tender, tender ulang atau tender belum selesai (sejumlah 10 Paket beserta link LPSE)	
19.	Dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024 meliputi Tahap Pemilihan dan Pelaksanaan sbb : <ul style="list-style-type: none"> • Kerangka Acuan Kerja (KAK); 	
20.	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; • Spesifikasi Teknis; • Rancangan Kontrak; • Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi; • Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; • Daftar Kuantitas dan Harga; • Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan; • Gambar Rancangan Pekerjaan; • Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; • Dokumen Penawaran Administratif; • Surat Penawaran Penyedia; • Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; • Berita Acara Pemberian Penjelasan; • Berita Acara Pengumuman Negosiasi; • Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding; • Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia; • Laporan Hasil Pemilihan Penyedia; • Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); • Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan ; • Surat Perintah Mulai Kerja; • Surat Jaminan Pelaksanaan; • Surat Jaminan Uang Muka; • Surat Jaminan Pemeliharaan; • Surat Tagihan; • Surat Pesanan E-<i>purchasing</i>; 	Seluruh Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Perintah Membayar; • Surat Perintah Pencairan Dana; • Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; • Laporan Penyelesaian Pekerjaan; • Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan; • Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>; • Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i> 	
	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil	Biro Organisasi dan BKD
21.	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2024- 2025	DPMPTSP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

22.	Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
23.	Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Keputusan mediasi dalam sengketa informasi	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Dr. IKA MARDIAH, M. Si.
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRAN I

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip



F61893039B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRAN II

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(Ditulis Nama Badan Publik)
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf e maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
MENINGAT	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862,2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
		<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor Tambahan Berita Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

Indonesia Nomor:
4. Dst
<https://sidoar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>



MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor.....Tahun.....
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN	:	KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran...ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor..Tahun yang tercantum dalam lampiran. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
<p>Ditetapkan di Bandung pada tanggal</p> <p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</p> <p>TTD+Stempel/capPPID/BadanPublik</p> <p>(.....Nama.....)</p>		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR..... TAHUN.....

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di.....Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)			Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
	Semua	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	



F61893039B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.				
2.				
3. Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD+Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)



F61893039B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRAN III

Laporan Permohonan Informasi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	Rata-rata Waktu Menjawab	Permohonan			Alasan Penolakan Informasi
				Diberikan	Diberikan Sebagian	Ditolak	
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
	Total						

Apabila permohonan informasi 0, mohon tabel tetap dibuatkan dengan keterangan “NIHIL”

Untuk perhitungan rata-rata waktu menjawab = jumlah penyelesaian permohonan informasi/ total jumlah permohonan informasi

Contoh :

Bulan Januari 2024 terdapat 2 permohonan informasi dengan penyelesaian 4 dan 6 hari, sehingga

Rata-rata waktu menjawab = $4+6 / 2 = 5$ hari



F61893039B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK*

No.	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biasa dan Cara Pembayaran		
								Dibawah Penggunaan		Belum Didokumentasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat / Mengetahui			Meminta Salinan	Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											

KETERANGAN:

- Nomor : diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- Tanggal : diisi tentang tanggal permohonan diterima.
- Nama : diisi tentang nama pemohon.
- Alamat : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi untuk memudahkan pengiriman informasi publik yang diminta.
- Nomor Kontak : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi Publik).
- Pekerjaan : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik
- Informasi Yang Diminta : diisi tentang detail informasi yang diminta.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan informasi.
- Status Informasi pemberitahuan tertulis : diisi dengan memberikan tanda(V). Bila tidak dibawah penguasaan, tuliskan Badan Publik lain yang menguasai bila diketahui, sesuai dengan isian diformulir.
- Bentuk Informasi Yang Dikuasai Jenis Permohonan : diisi dengan memberikan tanda(V).
- Keputusan Alasan Penolakan Hari dan Tanggal : diisi tentang alasan penolakan oleh atasan PPID. Diisi tentang:
 - a. Hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan ini.
 - b. Waktu pemberitahuan tertulis juga menandakan waktu penolakan informasi apabila permohonan ditolak. Dengan kata lain, dalam hal permohonan informasi publik ditolak, maka pemberitahuan tertulis ini sama dengan penolakan.
 - c. Hari dan tanggal pemberian informasi kepada Pemohon Informasi Publik. Diisi dengan biaya yang dibutuhkan serta rinciannya dan cara pembayaran yang dilakukan Biaya dan Cara Pembayaran.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRAN V

REGISTER KEBERATAN*

No.	Tgl.	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	No. pendaftaran permintaan informasi	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi	Alasan pengajuan keberatan							Keputusan Atasan PPI D	HARIDAN Tanggal Pemberian Tanggapan Atas Keberatan	Nama dan Posisi Atasan PPI D	Tanggapan Pemohon Informasi
									a*	b*	c*	d*	e*	f*	g*				

Keterangan:

- No. Tgl Nama : diisi tentang nomor registrasi keberatan.
- Alamat : diisi tentang tanggal keberatan diterima.
- Nomor Kontak : diisi dengan Nama Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan dan/atau kuasanya
- Pekerjaan : diisi tentang alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.
- No. Pendaftaran Permintaan Informasi : diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/faksimili/teleponseluler/email Pemohon Informasi Publik).
- Informasi Yang diminta : diisi tentang pekerjaan Pemohon Informasi Publik.
- Tujuan Penggunaan Informasi : diisi tentang nomor pendaftaran pada formulir permintaan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, maka kolom ini tidak perlu diisi.
- Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UUKIP) : diisi dengan informasi yang diminta.
- : diisi tentang tujuan/alasan permintaan dan penggunaan informasi.
- : diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:
 - a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

LAMPIRAN VI

LAPORAN SENGKETA INFORMASI TAHUN 2024

No.	Tanggal	No.Register	Pemohon	Termohon	Keterangan

Keterangan :
No. : Diisi dengan nomor urutan
Tanggal : Diisi dengan tanggal sengketa informasi
No. Register : Diisi dengan nomor register sengketa informasi
Pemohon : Diisi dengan nama pemohon sengketa informasi
Termohon : Diisi dengan nama termohon sengketa informasi
Keterangan : Hasil keputusan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

F61893039B

LAMPIRAN VII

AGENDA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Nama Program/Kegiatan	Penanggung Jawab/Pelaksana	Target	Jadwal Pelaksanaan	Sumber dan Besar Anggaran



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F61893039B>

F61893039B